

Tantangan Ideologi Pancasila Di Era Media Sosial: Analisis Pengaruh Polarisasi Digital terhadap Persatuan Bangsa

Alfonsa Ema Welan^{a,1}, Emiliana Kampas^{b,2}

^{a,b} Universitas Pamulang, Jl. Raya Puspitek, Buaran, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Kode Pos 15310

¹putrigisella623@gmail.com; ²emikampas@gmail.com

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima: 16 September 2025

Direvisi: 18 Oktober 2025

Disetujui: 20 November 2025

Tersedia Daring: 1 Desember 2025

Kata Kunci:

ideologi Pancasila,
media sosial,
polarisasi digital,
persatuan bangsa,
literasi digital

ABSTRAK

Di era digital, media sosial telah mengubah cara informasi diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi, sehingga menghadirkan tantangan baru bagi ideologi Pancasila sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Tingginya penetrasi internet dan media sosial, dengan 73,8% penduduk Indonesia terhubung ke internet dan 68,9% sebagai pengguna aktif media sosial, meningkatkan risiko polarisasi digital melalui mekanisme ruang gema, disinformasi, dan kurasi algoritmik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan ideologi Pancasila dalam konteks polarisasi digital serta mengkaji implikasinya terhadap persatuan bangsa. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi pustaka melalui penelaahan kritis terhadap artikel jurnal ilmiah, buku akademik, laporan kebijakan, dan dokumen penelitian yang relevan. Hasil kajian menunjukkan adanya celah dalam internalisasi nilai-nilai Pancasila, khususnya di kalangan generasi muda yang sangat dipengaruhi oleh algoritma media sosial. Polarisasi digital mendorong fragmentasi identitas, meningkatnya intoleransi, serta menurunnya kualitas dialog publik, yang berdampak negatif terhadap kohesi sosial dan praktik musyawarah. Selain itu, pola kurasi algoritmik yang memprioritaskan konten emosional dibandingkan narasi kritis mempersempit ruang deliberasi lintas kelompok. Temuan penelitian menegaskan bahwa tantangan terhadap Pancasila tidak disebabkan oleh lemahnya nilai ideologis, melainkan oleh perubahan ekologi informasi digital yang membentuk pola interaksi sosial baru. Oleh karena itu, penguatan literasi digital yang terintegrasi dengan pendidikan nilai, intervensi berbasis komunitas, serta tata kelola platform media sosial yang transparan menjadi strategi penting untuk mengurangi polarisasi digital dan memperkuat persatuan bangsa.

ABSTRACT

Keywords:

Pancasila ideology,
social media,
digital polarization,
national unity,
digital literacy

In the digital era, social media has transformed the way information is produced, distributed, and consumed, thereby posing new challenges to Pancasila as the ideological foundation and unifying force of the Indonesian nation. The high level of internet and social media penetration, with 73.8% of the population connected to the internet and 68.9% actively using social media, increases the risk of digital polarization through echo chambers, disinformation, and algorithmic curation. This study aims to analyze the challenges faced by Pancasila in the context of digital polarization and to examine its implications for national unity. The research adopts a qualitative approach using a literature review design by critically examining scholarly journal articles, academic books, policy reports, and relevant research documents. The findings indicate a gap in the internalization of Pancasila values, particularly among younger generations who are strongly influenced by social media algorithms. Digital polarization contributes to identity fragmentation, rising intolerance, and declining quality of public dialogue, which negatively affects social cohesion and deliberative practices. Moreover, algorithmic curation that prioritizes emotional content over critical narratives further narrows the space for cross-group deliberation. The study concludes that challenges to Pancasila do not stem from weaknesses in its ideological values, but rather from changes in the digital information ecosystem that shape new patterns of social interaction. Therefore, strengthening digital literacy integrated with value education, community-based interventions, and transparent governance of social media platforms are essential strategies to reduce digital polarization and reinforce national unity.

1. Pendahuluan

Di era digital, media sosial telah mengalami pergeseran fungsi yang signifikan, dari sekadar sarana komunikasi interpersonal menjadi ruang publik utama tempat pembentukan opini, mobilisasi sosial, serta kontestasi identitas berlangsung secara intensif dan masif (Suhendra dan Pratiwi, 2024). Dalam konteks Indonesia, kondisi ini menjadi semakin kompleks mengingat Indonesia termasuk salah satu negara dengan jumlah pengguna media sosial terbesar di dunia. Arus informasi yang beredar di ruang digital berlangsung sangat cepat dan tidak selalu diiringi dengan akurasi, karena informasi faktual bercampur dengan informasi yang menyesatkan dan manipulatif. Berdasarkan data terkini, dari total 277,7 juta penduduk Indonesia, sebanyak 204,7 juta orang telah terhubung ke internet atau sekitar 73,8% dari populasi, sementara pengguna aktif media sosial mencapai 191,4 juta orang atau setara dengan 68,9% penduduk (The Global Statistics, 2024). Jumlah pengguna yang sangat besar ini menunjukkan bahwa media sosial bukan lagi fenomena netral, melainkan memiliki implikasi serius terhadap dinamika sosial, termasuk kohesi sosial dan persatuan bangsa.

Intensitas penggunaan media sosial yang tinggi turut diperkuat oleh mekanisme algoritmik yang mengatur arus informasi berdasarkan preferensi pengguna. Kondisi ini meningkatkan risiko terbentuknya ruang gema atau echo chamber, yakni situasi ketika pengguna lebih sering terpapar pada konten dan opini yang sejalan dengan keyakinan mereka sendiri, sementara pandangan yang berbeda, bahkan fakta objektif, cenderung diabaikan atau disingkirkan (Tjasmadi dan Christianto, 2025). Dalam ruang digital semacam ini, proses dialog yang sehat menjadi terhambat karena interaksi berlangsung secara homogen dan tertutup. Selain itu, media sosial juga kerap dimanfaatkan sebagai sarana penyebaran informasi yang tidak seluruhnya benar. Dengan basis pengguna yang sangat besar, konten hoaks, ujaran kebencian, dan propaganda dapat menyebar dengan sangat cepat dan luas. Situasi ini mendorong terjadinya polarisasi sosial yang tidak hanya didasarkan pada perbedaan pendapat, tetapi juga dipicu oleh misinformasi yang membangkitkan emosi, kecurigaan, dan konflik antarkelompok (Ramadhani, 2025).

Fenomena tersebut diperkuat oleh data dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang mencatat sepanjang periode 1 Januari hingga 31 Desember 2024 terdapat 1.923 temuan hoaks. Rincian kasus per bulan menunjukkan angka yang relatif konsisten dan cenderung tinggi, dengan 143 kasus pada Januari, 131 pada Februari, 162 pada Maret, 143 pada April, 164 pada Mei, 153 pada Juni, 170 pada Juli, 162 pada Agustus, 173 pada September, 215 pada Oktober, 166 pada November, dan 141 pada Desember. Puncak temuan hoaks tercatat pada Oktober dengan 215 kasus, yang menunjukkan eskalasi signifikan dalam periode tertentu (Komdigi, 2025). Tingginya angka ini menjadi persoalan serius karena penggunaan media sosial yang masif tidak diimbangi dengan kemampuan verifikasi informasi yang memadai. Akibatnya, hoaks mudah dipercaya dan dibagikan kembali, sehingga memengaruhi persepsi, sikap, dan perilaku masyarakat secara luas. Paparan media digital yang tinggi tanpa kontrol kritis terbukti menciptakan ruang yang subur bagi berkembangnya misinformasi dan menurunnya kualitas literasi informasi publik (Yashila dan Athifahputih, 2022).

Implikasi dari berbagai fenomena tersebut berpengaruh kuat terhadap internalisasi ideologi Pancasila, khususnya di kalangan generasi muda yang merupakan mayoritas pengguna aktif platform digital. Generasi milenial dan Generasi Z tumbuh dalam lingkungan informasi yang sangat terbuka, dengan paparan budaya global, algoritme konten, serta

konsumsi narasi yang cepat dan berulang. Dalam situasi ini, proses pembelajaran dan penanaman nilai-nilai kebangsaan tidak lagi hanya berlangsung melalui institusi formal seperti sekolah dan keluarga, tetapi juga melalui kultur digital yang sering kali bersifat komersial, sensasional, dan fragmentaris (Nurlaila et al., 2024). Kondisi tersebut memunculkan celah antara pengetahuan formal mengenai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa dengan praktik penghayatan serta penerapan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Kesenjangan kognitif dan afektif ini membuka ruang bagi berkembangnya narasi alternatif yang tidak selalu sejalan dengan semangat persatuan, toleransi, dan musyawarah sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila. Oleh karena itu, periode transisi nilai pada generasi muda menjadi titik rentan yang memerlukan intervensi pendidikan nilai yang lebih adaptif terhadap ekosistem digital (Rastati, 2022).

Lebih jauh, media sosial juga memfasilitasi penyebaran sentimen identitas dan intoleransi melalui struktur jaringan daring dan mekanisme viralisasi konten. Isu-isu sensitif yang berkaitan dengan suku, agama, ras, antargolongan, gender, dan identitas lainnya mudah terekspos dan kemudian diperkuat oleh akun-akun yang berpihak. Konflik yang semula bersifat lokal dan terbatas dapat dengan cepat meluas menjadi krisis berskala nasional ketika dipicu oleh narasi provokatif yang viral. Selain itu, potensi radikalisme digital cenderung lebih tinggi pada kelompok usia muda yang aktif di internet, sehingga ruang digital menjadi medan persaingan ideologis yang rawan dan berbahaya (Najib, Maftuh dan Malihah, 2015). Salah satu akar permasalahan yang memperparah kondisi ini adalah belum matangnya literasi digital dan literasi ideologi di kalangan masyarakat. Indeks literasi digital nasional menunjukkan bahwa sebagian besar populasi masih berada pada kategori “sedang”, yang mandatkan bahwa kemampuan verifikasi informasi, pemahaman terhadap cara kerja algoritme, serta etika bermedia digital masih perlu ditingkatkan secara sistematis (Saidi, Supriyono dan Atok, 2022). Ketidaksiapan dalam memverifikasi kebenaran informasi membuat masyarakat mudah terjebak dalam hoaks, sementara minimnya pemahaman mendalam tentang Pancasila menyebabkan wacana kebangsaan sering direduksi menjadi slogan normatif tanpa implementasi praksis yang nyata (Basuki dan Setyawan, 2022). Oleh sebab itu, penguatan literasi digital semestinya tidak hanya menekankan aspek teknis, tetapi juga pendidikan nilai yang mengintegrasikan kemampuan berpikir kritis dengan pemahaman ideologi negara.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan ideologi Pancasila di era media sosial serta mengkaji bagaimana polarisasi digital memengaruhi persatuan bangsa. Untuk memperkuat analisis, penelitian ini menggunakan kerangka teori filter bubble atau echo chamber yang menjelaskan bahwa mekanisme personalisasi konten di platform digital cenderung menyajikan informasi yang selaras dengan preferensi pengguna (Wuldanari, Rullyana dan Ardiansah, 2021). Akibatnya, pengguna lebih sering terpapar pada pesan yang mengonfirmasi keyakinan mereka sendiri dan jarang berinteraksi dengan sudut pandang yang berbeda. Dalam konteks kebangsaan, kondisi ini memfasilitasi terbentuknya kelompok-kelompok sosial yang terfragmentasi, memperkuat stereotip, serta mempersempit ruang dialog lintas golongan, sehingga melemahkan praktik musyawarah dan semangat persatuan yang menjadi inti nilai Pancasila. Efek gema ini tidak semata-mata dipicu oleh preferensi individu, tetapi juga oleh desain platform dan logika komersial yang memprioritaskan keterlibatan pengguna (engagement) di atas kualitas diskursus publik (Fajarini, Yuliani dan Kurniawati, 2025).

Selain itu, teori identitas sosial digunakan untuk menjelaskan bagaimana individu cenderung mendefinisikan dirinya sebagai bagian dari kelompok tertentu, seperti kelompok politik, agama, atau komunitas sosial lainnya (Ruslan dan Hakiki, 2022). Dalam kondisi tersebut, perbedaan pendapat yang seharusnya dapat dibahas secara rasional sering kali berubah menjadi konflik emosional, karena individu lebih terdorong untuk membela kelompoknya sendiri tanpa mempertimbangkan informasi atau argumen dari pihak lain.

Situasi ini membuat polarisasi digital semakin tajam, karena kelompok yang berbeda lebih mudah dipersepsikan sebagai lawan atau ancaman (Naila et al., 2024). Proses inilah yang berpotensi mengganggu nilai-nilai Pancasila, terutama sikap saling menghormati, toleransi, dan semangat persatuan. Ketika identitas kelompok menjadi terlalu dominan di ruang digital, ruang dialog menjadi semakin sempit dan masyarakat semakin sulit menjaga relasi sosial yang harmonis antar-golongan.

Selanjutnya, penelitian ini juga memanfaatkan perspektif teori demokrasi deliberatif yang menekankan bahwa kualitas keputusan bersama sangat bergantung pada mutu proses diskusi publik yang inklusif dan rasional (Murdianto, Alamsyah dan Srisnardi, 2025). Dalam kerangka ini, masyarakat idealnya saling mendengar, mempertimbangkan argumen satu sama lain, serta bersedia merevisi pandangan jika dihadapkan pada alasan yang lebih kuat. Prinsip tersebut selaras dengan nilai musyawarah yang terkandung dalam Pancasila. Melalui perspektif deliberatif, kondisi ruang publik digital dapat dianalisis untuk melihat sejauh mana media sosial berkontribusi terhadap penurunan kualitas dialog publik. Pendekatan ini sekaligus membuka ruang untuk merumuskan upaya perbaikan, seperti pengembangan desain platform yang lebih sehat, regulasi yang mendorong percakapan beretika, serta pendidikan digital yang mampu menghidupkan kembali budaya musyawarah yang inklusif sesuai dengan amanat Pancasila.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi pustaka (*literature review*) untuk menganalisis pengaruh polarisasi digital terhadap ideologi Pancasila. Pendekatan kualitatif dipahami sebagai metode penelitian yang menekankan pada upaya memperoleh pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial melalui penafsiran makna, konteks, serta dinamika pengalaman sosial, bukan semata-mata melalui pengukuran numerik atau statistik (Wulan et al., 2025). Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menelaah secara kritis berbagai gagasan, konsep, dan temuan yang berkaitan dengan polarisasi digital, media sosial, serta internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Desain studi pustaka digunakan karena penelitian ini bertumpu pada pengumpulan, penelaahan, dan sintesis sumber-sumber ilmiah yang relevan, seperti artikel jurnal terakreditasi, buku akademik, laporan kebijakan, serta dokumen penelitian yang membahas tema ideologi, literasi digital, media sosial, dan polarisasi sosial. Studi pustaka memungkinkan peneliti untuk membangun pemahaman yang komprehensif dan sistematis terhadap perkembangan wacana serta temuan empiris yang telah ada, sehingga dapat mengidentifikasi pola, kesenjangan, dan kecenderungan konseptual dalam kajian polarisasi digital dan ideologi Pancasila (Abdurrahman, 2024). Pemilihan metode kualitatif dengan desain studi pustaka didasarkan pada pertimbangan bahwa isu polarisasi digital dan tantangannya terhadap ideologi Pancasila merupakan fenomena sosial yang kompleks, kontekstual, dan sarat makna. Fenomena tersebut tidak dapat dijelaskan secara utuh hanya melalui data kuantitatif, melainkan memerlukan penafsiran kritis terhadap narasi, argumen, dan kerangka teoritis yang berkembang dalam literatur akademik. Dengan demikian, pendekatan ini dinilai paling tepat untuk menggali secara mendalam hubungan antara dinamika media sosial, pembentukan polarisasi digital, serta implikasinya terhadap penghayatan dan praktik nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

3. Hasil dan Pembahasan

Tantangan Ideologi Pancasila di Era Media Sosial

Fenomena polarisasi digital pada platform media sosial memperlihatkan konfigurasi epistemik yang bersifat fragmentatif sehingga ruang publik menjadi tersegmentasi ke dalam ruang gema yang meneguhkan preferensi afektif pengguna dan mengesampingkan pluralitas

perspektif. Penguatan echo chamber dan filter bubble berimplikasi pada distorsi akses informasi sehingga narasi kebangsaan yang memusatkan pada nilai Pancasila mengalami difusi makna. Bukti empiris yang dikompilasi dari kajian pustaka menunjukkan bahwa kurasi algoritmik dan mekanika rekomendasi konten mempercepat sirkulasi konten yang memicu resonansi emosional dibandingkan konten yang menawarkan refleksi kritis, kondisi yang menguntungkan reproduksi ujaran kebencian dan disinformasi dan merongrong norma deliberasi publik. Argumen ini sinkron dengan analisis mengenai keterkaitan antara eksposur selektif dan intensifikasi polarisasi politik di Indonesia yang menunjukkan bagaimana isu yang semula bersifat sektoral meluas menjadi konflik afiliasi identitas (Ali dan Eriyanto, 2021).

Analisis wacana akademik terkini menegaskan adanya disonan antara fungsi historis Pancasila sebagai ideologi pemersatu dan realitas komunikatif era digital yang berciri kecepatan dan viralitas. Narasi yang dahulu dibangun melalui institusi formal pendidikan dan ritual kenegaraan kini bersaing dengan perangkat naratif mikro yang menyebar cepat lewat jejaring sosial. Transformasi ini memunculkan problematik legitimasional yakni bagaimana nilai Pancasila dapat diinternalisasi ketika sumber otoritas informasi berserakan dan kredibilitas tradisional mengalami erosi. Literatur tentang revitalisasi nilai kebangsaan merekomendasikan pendekatan komunikatif yang adaptif termasuk penguatan literasi digital yang kontekstual dan strategis untuk merekonstruksi kembali wacana kebangsaan agar mampu berinteraksi produktif dengan ekosistem media baru (Ruyadi et al., 2023).

Dinamika afektif pengguna media sosial menimbulkan modal emosional yang secara kolektif memfasilitasi pembentukan identitas politik yang eksklusif sehingga kohesi sosial menjadi rapuh. Penelitian yang menelaah hubungan antara populisme digital dan performativitas politik mengindikasikan bahwa strategi komunikasi yang bersifat mengkonstruksi oposisi dan sinisme terhadap lawan politik berpotensi mengkristalkan polarisasi yang sulit dibalik melalui argumen rasional saja. Dampak praktis dari pola ini adalah terjadinya fragmentasi jaringan sosial horizontal dan meningkatnya toleransi terhadap kebencian yang mengancam persatuan yang diidealkan oleh Pancasila. Strategi mitigasi yang diusulkan oleh sejumlah kajian mencakup intervensi regulatif pada mekanisme platform dan inisiatif edukatif berbasis komunitas untuk memperkuat kapasitas deliberatif warganegara (Nadzir, 2022).

Kajian komparatif atas platform yang berbeda mengungkapkan bahwa mekanisme operasional masing masing platform menghasilkan pola polarisasi yang variatif. Algoritma rekomendasi pada platform berbasis video menyebabkan amplifikasi konten visual emosional sedangkan platform berbasis teks memfasilitasi pembentukan narasi yang lebih terpolarisasi melalui rantai retorika. Variasi medium ini menuntut adaptasi strategi kebijakan publik yang tidak bersifat satu ukuran untuk semua melainkan responsif terhadap karakteristik teknis dan demografis masing masing platform. Beberapa studi kasus di Indonesia menunjukkan bahwa generasi muda memiliki tingkat rentan polarisasi yang dipengaruhi oleh logika gamifikasi dan estetika konsumsi konten sehingga intervensi literasi digital harus memperhitungkan dimensi budaya konsumsi tersebut (Avrilia et al., 2025).

Persepsi terhadap Pancasila sebagai living ideology mengalami kontestasi interpretatif ketika wacana digital memungkinkan aktor non tradisional untuk memonopoli bahasa kebangsaan. Proliferasi konten yang memanipulasi simbol simbol kebangsaan menghasilkan dislokasi semantik yang berpotensi mereduksi signifikansi norma normatif Pancasila. Pendekatan hermeneutik yang diusulkan oleh sejumlah peneliti menekankan perlunya praksis komunikatif yang rekuperatif untuk merekonstruksi muatan nilai melalui narasi yang menarik dan relevan bagi sub populasi yang berbeda. Intervensi komunikatif tersebut diharapkan mampu menahan eskalasi narasi identitas eksklusif dengan menawarkan narasi alternatif yang menautkan afiliasi identitas lokal dengan nilai nilai Pancasila (Sajidin, Farhanuddin dan Saputra, 2025).

Tinjauan empiris terhadap implikasi sosial politik memperlihatkan bahwa polarisasi digital tidak hanya berdampak pada kualitas diskursus publik tetapi juga pada struktur jaringan solidaritas sosial. Penelitian mengenai dampak polarisasi terhadap kohesi sosial menyatakan bahwa fragmentasi jaringan interaksi sosial meningkatkan kerentanan terhadap konflik horizontal terutama pada konteks multietnik dan multireligius. Ancaman tersebut bukan sekadar teori melainkan telah didokumentasikan dalam sejumlah kasus di Indonesia yang mengaitkan eskalasi konflik dengan polarisasi diskursus online. Oleh karena itu penegakan norma norma kebangsaan memerlukan sinergi antara regulasi platform, program literasi kritik, dan penguatan institusi institusi kebudayaan yang mampu memfasilitasi pertemuan dialogis antar kelompok (Wardani, 2025).

Tabel berikut merangkum aspek aspek tantangan, manifestasi di ranah digital, implikasi terhadap persatuan bangsa, dan rujukan pustaka yang relevan untuk setiap aspek tersebut.

Tabel 1. Tantangan ideologi Pancasila di era media sosial

Aspek Tantangan	Manifestasi di Media Sosial	Implikasi pada Persatuan Bangsa	Referensi
Kurasi algoritmik dan echo chamber	Personalisasi konten yang mengurangi diversitas perspektif	Penurunan kapasitas deliberatif dan meningkatnya polarisasi identitas	(Avrilia et al., 2025)
Diseminasi disinformasi dan ujaran kebencian	Viralitas konten provokatif tanpa verifikasi	Erosi kepercayaan antar kelompok sosial	(Hidayat, 2025)
Komodifikasi simbol kebangsaan	Instrumentalisasi simbol untuk tujuan politis mikro	Reduksi makna ideologis Pancasila menjadi alat retorika	(Nasoha et al., 2025)
Fragmentasi generasional	Preferensi platform berbeda mengarah pada kesenjangan wacana	Diskontinuitas transmisi nilai kebangsaan antar generasi	(Purboyo et al., 2025)
Politisasi identitas	Mobilisasi daring berbasis identitas agama etnis	Potensi konflik horizontal dan delegitimasi kesepakatan bersama	(Faizin et al., 2025)

Pembahasan terapan mengindikasikan bahwa upaya mitigasi polarisasi digital wajib mengombinasikan strategi preventif dan korektif. Strategi preventif mencakup pembekalan kemampuan literasi digital yang menekankan kompetensi verifikasi dan hermeneutik sehingga individu mampu mengidentifikasi manipulasi retorik dan praksis deliberate misinformation. Program edukatif yang terintegrasi dalam kurikulum formal serta program non formal yang bersinergi dengan komunitas lokal terbukti penting untuk memperluas basis pemahaman nilai nilai Pancasila yang kontekstual. Intervensi korektif melibatkan tata kelola platform yang lebih transparan terkait logika rekomendasi serta mekanisme cepat untuk mendanai dan menurunkan konten berbahaya. Penelitian terdahulu merekomendasikan kolaborasi multi pemangku kepentingan di level pemerintah platform dan masyarakat sipil untuk mengharmonisasikan standar moderasi konten tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi (Ali dan Eriyanto, 2021).

Evaluasi kualitatif atas efektivitas program revitalisasi nilai kebangsaan menunjukkan bahwa pendekatan komunikatif yang memedomani kultur lokal memiliki peluang lebih tinggi untuk resonansi dibandingkan narasi top down yang eksklusif. Pendekatan bottom up yang memanfaatkan agen agen budaya lokal serta media komunitas mampu menjembatani jurang epistemik antara generasi dan kelompok sosial yang berbeda. Upaya ini perlu didampingi indikator indikator evaluasi yang operasional untuk mengukur perubahan disposisi warga terhadap nilai Pancasila serta tingkat keterlibatan deliberatif di ruang online. Studi studi sukses di tingkat lokal menyajikan bukti bahwa narasi kebangsaan yang disesuaikan dengan konteks setempat dapat menekan eskalasi polarisasi dan memperkuat ikatan sosial (Sajidin, Farhanuddin dan Saputra, 2025).

Pertimbangan normatif dalam ranah kebijakan menuntut keseimbangan antara perlindungan persatuan dan kebebasan berekspresi. Rangka kebijakan yang efektif harus menyediakan mekanisme akuntabilitas bagi aktor platform sekaligus memberikan ruang remedial bagi korban ujaran kebencian. Regulasi semacam itu sebaiknya dirancang dengan prinsip proporsionalitas dan keterbukaan sehingga tidak menjadi instrumen represi terhadap wacana kritis yang sah. Kajian hukum dan kebijakan di Indonesia menekankan perlunya dialog multi sektoral untuk merumuskan pedoman yang adaptif terhadap perubahan teknologi tanpa melemahkan prinsip prinsip demokrasi deliberatif (Nasoha et al., 2025).

Penting untuk dilakukan penelitian lanjutan yang mengintegrasikan perspektif inter disiplin. Pendekatan yang menggabungkan analisis jaringan sosial kuantitatif dengan kajian wacana kualitatif mampu memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana polarisasi terbentuk dan bagaimana efeknya terhadap internalisasi nilai nilai Pancasila. Perlu perhatian khusus terhadap dimensi demografis dan geografis karena dinamika polarisasi dapat berbeda antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Penelitian longitudinal direkomendasikan untuk memetakan trajektori pergeseran sikap kebangsaan seiring dengan evolusi ekosistem digital dan kebijakan platform (Sukidin, Hudha dan Basrowi, 2025).

Terakhir, implikasi praktis bagi penguatan Pancasila di era media sosial menuntut orkestrasi antara kurikulum pendidikan kebangsaan literasi digital kebijakan platform dan inisiatif komunitas. Sinergi tersebut bertujuan menciptakan ekosistem informasi yang kondusif bagi pembentukan wacana kebangsaan inklusif dan deliberatif. Penciptaan mekanisme evaluasi berkelanjutan terhadap intervensi kebijakan menjadi kunci agar upaya revitalisasi nilai kebangsaan dapat diadaptasi seiring evolusi teknologi komunikasi. Bukti pustaka memperkuat gagasan bahwa respons multidimensi dan adaptif merupakan prasyarat agar Pancasila tidak hanya menjadi simbol tetapi suatu praktik hidup yang resilien terhadap arus polarisasi digital (Sajidin, Farhanuddin dan Saputra, 2025).

Polarisasi Digital dan Pengaruhnya terhadap Persatuan Bangsa

Fenomena polarisasi digital menampakkan konfigurasi afektif dan epistemik yang berlapis sehingga ruang publik daring berubah menjadi medan kompetisi naratif; kecenderungan algoritmik untuk mengoptimalkan keterlibatan menghasilkan kurasi yang privileging konten emosional sehingga paparan publik terhadap argumen yang bersifat kritis atau multi perspektif mengalami penyempitan signifikan. Observasi empiris lintas negara menunjukkan bahwa diseminasi disinformasi dan ujaran permusuhan berkolerasi dengan peningkatan split afektif yang mengikis modal sosial diperlukan untuk kohesi kolektif, dengan dinamika tersebut menjadi lebih akut pada momen politik sensitif atau krisis nasional di mana sirkulasi konten viral mampu memicu mobilisasi massa yang terfragmentasi. Kajian komparatif menegaskan peran kompleks disinformasi sebagai katalisator polarisasi yang bekerja bersama mekanisme platform untuk memperkuat segregasi informasi dalam kluster homofilik sehingga probabilitas kontak deliberatif antarklaim berkurang drastis (Vasist, Chatterjee dan Krishnan, 2024).

Transformasi simbolik nilai kebangsaan di arena digital menunjukkan pergeseran semantik dimana simbol nasional berisiko dikomodifikasi sebagai instrumen mobilisasi

identitas sempit sehingga fungsi normatif ideologi yang menyatukan menjadi tergusur oleh pragmatisme retorik; proses ini termanifestasi lewat kampanye hashtag yang menysar resonansi emosional serta melalui konten audiovisual yang dioptimasi untuk viralitas alih alih rekonstruksi makna normatif. Studi kasus pada konteks Indonesia memaparkan bagaimana narasi xenofobia dan polaritas terhadap kelompok rentan berkembang pesat di beberapa wilayah melalui kampanye terkoordinasi yang memanfaatkan celah moderasi platform, menghasilkan erosi kepercayaan antar komunitas dan menurunkan kapasitas negosiasi sosial. Perlu strategi rekontekstualisasi nilai yang memadukan hermeneutika lokal dengan praktik komunikasi digital yang responsif agar simbol kebangsaan dapat dibaca ulang secara inklusif (Chan dan Yi, 2024).

Dimensi generasional memperlihatkan heterogenitas repertoar media yang menjadi faktor determinan pola paparan informasi dan predisposisi terhadap polarisasi; preferensi generasi digital native terhadap platform yang mengadankan format video singkat dan estetika gamifikasi menghasilkan jalur kurasi yang memiliki norma epistemik tersendiri sehingga perdebatan nilai tidak lagi berlangsung di ruang shared yang sama. Penelitian kuantitatif dan kualitatif pada perilaku media generasi muda menyingkap bahwa algoritma rekomendasi memfasilitasi terciptanya subkultur digital dengan repertoar wacana yang cepat berubah sementara saluran tradisional untuk transmisi nilai kebangsaan menjadi semakin kurang relevan untuk segmen tersebut. Intervensi edukatif yang bersifat generasional dan berbasis media spesifik direkomendasikan untuk menjangkau ekosistem konsumsi konten yang berbeda sambil mempertahankan muatan normatif nilai kebangsaan (Komara dan Widjaya, 2024).

Struktur jaringan sosial daring memperlihatkan perubahan topologis yang signifikan dimana pembentukan klaster afinitas homogen mengurangi frekuensi hubungan lintas klaster sehingga probabilitas kompromi serta pemahaman mutual mengalami depresiasi; analisis jaringan sosial mengindikasikan bahwa semakin modular suatu jaringan maka kapasitasnya untuk memediasi konflik menurun sehingga risiko eskalasi horizontal meningkat. Hasil pemodelan menyarankan bahwa intervensi yang rekayasa affordance ruang publik, seperti mendorong konten kolaboratif antar kelompok dan platform fitur yang mempromosikan eksposur terukur terhadap perspektif lain, memiliki potensi untuk menurunkan tingkat polarisasi sekaligus memperbesar ruang untuk deliberasi rasional. Pendekatan ini harus dioperasionalkan melalui sinergi antara desain platform dan kebijakan publik yang mengutamakan keterbukaan algoritma serta fasilitasi pertemuan dialogis antar komunitas (Komara dan Widjaya, 2024).

Mekanisme normatif dan regulatif menjadi elemen penting untuk menahan eskalasi polarisasi tanpa mereduksi hak kebebasan berekspresi sehingga prinsip proporsionalitas dan akuntabilitas harus menjadi landasan pembuatan kebijakan; beberapa yurisdiksi telah mulai menerapkan kewajiban transparansi terkait logika rekomendasi serta kewajiban penyediaan saluran pengaduan yang responsif untuk korban ujaran kebencian. Evaluasi kebijakan tersebut menunjukkan bahwa tata kelola platform yang hanya bersifat teknokratis tidak mencukupi karena tanpa peningkatan kapabilitas literasi masyarakat, intervensi regulatif dapat berujung pada efek balik berupa penguatan narasi victimhood dan teori konspirasi. Oleh karena itu kebijakan yang efektif perlu dilengkapi dengan program literasi kritis yang kontekstual serta partisipasi aktif aktor masyarakat sipil untuk memastikan akuntabilitas kolektif (Chan dan Yi, 2024).

Dinamika afektif yang terinternalisasi oleh kelompok digital memengaruhi predisposisi terhadap kompromi sehingga penguatan modal emosional inklusif menjadi strategi nonteknis yang esensial; intervensi yang berhasil di beberapa studi melibatkan inisiatif community engagement yang memfasilitasi kontak langsung antarpelaku wacana serta penggunaan narasi yang menautkan kepentingan lokal dengan nilai kebangsaan secara sinergis. Terapan pedagogi deliberatif yang mengembangkan kapasitas argumentasi, empati epistemik, serta literasi

verifikasional menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam menurunkan percaya pada disinformasi dan meningkatkan toleransi terhadap perbedaan. Pendekatan ini mensyaratkan pengukuran outcome sekaligus monitoring longitudinal untuk menilai perubahan disposition warga terhadap narasi kebangsaan dalam jangka menengah hingga panjang (Vasist, Chatterjee dan Krishnan, 2024).

Metodologi penelitian pada topik polarisasi digital menuntut sintesis interdisipliner yang menggabungkan analisis jaringan kuantitatif, analisis wacana kualitatif, dan eksperimen lapangan untuk menguji efektivitas intervensi; studi longitudinal dan eksperimen naturalistik dapat memetakan trajektori perubahan sikap serta menilai dampak kebijakan platform dalam konteks nyata. Penekanan pada varian demografis dan geografis merupakan hal penting karena heterogenitas kapasitas digital serta pengalaman historis masing-masing komunitas memengaruhi kerentanan terhadap polarisasi. Pengembangan metrik operasional untuk mengukur kualitas deliberasi serta internalisasi nilai kebangsaan di ranah digital akan meningkatkan kemampuan evaluatif terhadap program-program revitalisasi nilai kebangsaan sehingga intervensi dapat diadaptasi berdasarkan bukti empiris yang valid (Ahmmad et al., 2025).

Perlu adanya kombinasi tindakan preventif dan korektif yaitu peningkatan literasi digital kontekstual, keterbukaan algoritmik, dan penguatan institusi kultur lokal yang mempunyai legitimasi sosial; pelaksanaan program-program tersebut harus disertai indikator evaluasi yang jelas agar perubahan kualitas interaksi sosial daring dapat diukur. Sinergi antarpemangku kepentingan merupakan prasyarat karena platform teknologi, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan pembuat kebijakan memiliki peran komplementer yang tidak dapat digantikan satu sama lain. Implementasi yang adaptif terhadap dinamika teknologi serta kesensitifan terhadap konteks lokal menjadi kunci agar rasionalitas normatif kebangsaan tetap hadir sebagai fondasi persatuan dalam ekosistem komunikasi yang semakin terdistribusi (Chan dan Yi, 2024).

Polarisasi digital memanifestasi sebagai fenomena multifaset dengan implikasi langsung terhadap kohesi sosial sehingga respons yang efektif harus bersifat multidimensional dan evidence based; kebijakan regulatif yang berpijak pada prinsip keterbukaan, program edukatif yang menghantarkan literasi verifikasional, serta inisiatif komunitas yang memfasilitasi dialog antarmotivasi berbeda diperlukan untuk mereduksi fragmentasi naratif. Investasi pada penelitian transformatif yang memadukan pendekatan kuantitatif dan kualitatif serta kolaborasi lintas sektor akan meningkatkan kapasitas adaptif institusi sosial untuk menjaga persatuan dalam menghadapi arus polarisasi digital yang terus berevolusi (Vasist, Chatterjee dan Krishnan, 2024).

4. Kesimpulan

Polarisasi digital di media sosial telah memperkuat fragmentasi sosial, memperlemah ruang dialog, serta menggeser pemaknaan nilai-nilai Pancasila, terutama prinsip persatuan dan musyawarah. Fenomena seperti echo chamber, bias algoritmik, disinformasi, dan politisasi identitas tidak hanya memperdalam perbedaan pandangan, tetapi juga memicu ketegangan emosional antarkelompok yang berdampak pada menurunnya kepercayaan sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan terhadap ideologi Pancasila di era digital bukan terletak pada kelemahan konsep Pancasila itu sendiri, melainkan pada perubahan ekologi informasi yang membentuk pola interaksi sosial baru di masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa polarisasi digital merupakan faktor signifikan yang perlu ditangani secara sistematis guna menjaga keberlanjutan nilai-nilai kebangsaan dalam ruang publik. Upaya penguatan ideologi Pancasila perlu disesuaikan dengan dinamika ekosistem digital yang terus berkembang. Penguatan literasi digital, pembenahan tata kelola platform media sosial, rekontekstualisasi nilai-nilai Pancasila bagi generasi muda, serta penciptaan ruang dialog yang

lebih inklusif menjadi langkah strategis yang perlu diarahkan pada transformasi budaya digital, bukan semata-mata pada pendekatan regulatif. Pendidikan ideologi Pancasila juga tidak lagi cukup jika hanya berbasis ceramah atau kurikulum formal, melainkan harus terintegrasi dengan pola komunikasi dan interaksi masyarakat di media sosial. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan dan program yang lebih responsif terhadap tantangan ideologis di era media digital.

5. Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Universitas Pamulang atas dukungan akademik dan fasilitas yang diberikan selama proses penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan masukan, saran, dan kontribusi pemikiran sehingga artikel ini dapat diselesaikan dan dipublikasikan dengan baik.

6. Daftar Pustaka

- Abdurrahman (2024) 'Metode Penelitian Kepustakaan dalam Pendidikan Islam', *Adabuna: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran*, 3(2), pp. 102–113.
- Ahmmad, M. et al. (2025) 'Trap of Social Media Algorithms: A Systematic Review of Research on Filter Bubbles, Echo Chambers, and Their Impact on Youth', *Societies*, 15(301), pp. 1–17. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/soc15110301>.
- Ali, D.J. and Eriyanto (2021) 'Political Polarization and Selective Exposure of Social Media Users in Indonesia', *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 24(3), pp. 268–283. Available at: <https://doi.org/10.22146/jsp>.
- Avrilia, M.V. et al. (2025) 'The Role of TikTok's Algorithm in Political Polarization and Disinformation in Indonesia', *CAKRA COMMUNICO: Journal of Communication Science*, 2(2), pp. 67–75.
- Basuki, U. and Setyawan, H. (2022) 'LANGKAH STRATEGIS MENANGKAL HOAX: SUATU PENDEKATAN KEBIJAKAN DAN HUKUM', *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 2(1), pp. 1–22.
- Chan, M. and Yi, J. (2024) 'Social Media Use and Political Engagement in Polarized Times. Examining the Contextual Roles of Issue and Affective Polarization in Developed Democracies Social Media Use and Political Engagement in Polarized Times. Examining the Contextual Roles of Issue and Affective Polarization in Developed Democracies', *Political Communication*, 41(5), pp. 743–762. Available at: <https://doi.org/10.1080/10584609.2024.2325423>.
- Faizin, B. et al. (2025) 'Polarization of Religious Issues in Indonesia's Social Media Society and Its Impact on Social Conflict', *Journal of Applied Data Sciences*, 6(1), pp. 426–442. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.47738/jads.v6i1.447>.
- Fajarini, S.D., Yuliani, F. and Kurniawati, J. (2025) 'PERAN ALGORITMA MEDIA SOSIAL DALAM MEMBENTUK FILTER BUBBLE DAN ECHO CHAMBER DI KALANGAN MILENIAL DAN GEN Z KOTA', *Jurnal Sarjana Ilmu Komunikasi (J-SIKOM)*, 6(1). Available at: <https://doi.org/DOI.10.36085/jsikom.v6i1.8456>.
- Hidayat, N. (2025) 'Narasi Kebangsaan di Era Media Sosial: Relevansi Pancasila dalam Ekosistem Digital Pancasila diakui sebagai nilai dasar yang tidak tergantikan, tetapi proses aktualisasinya', *PACIVIC (Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan)*, 5(1), pp. 105–118.



- Komara, D.A. and Widjaya, S.N. (2024) 'Memahami Perilaku Informasi Gen-Z dan Strategi Melawan Disinformasi: Sebuah Tinjauan Literatur Penggunaan Media Sosial', *Jurnal Pustaka Ilmiah*, 10(2), p. 155. Available at: <https://doi.org/10.20961/jpi.v10i2.85775>.
- Komdigi (2025) Komdigi Identifikasi 1.923 Konten Hoaks Sepanjang Tahun 2024, Kementerian Komunikasi dan Digital.
- Murdianto, R.B., Alamsyah, M.N. and Srisnardi (2025) 'Demokrasi deliberatif dalam musyawarah rencana pembangunan desa di desa kayu agung kecamatan mepanga kabupaten parigi moutong', *JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan*, 1(04), pp. 204–216.
- Nadzir, I. (2022) 'PERFORMATIVE POLITICS AND DIGITAL POPULISM IN INDONESIA', *Jurnal Penelitian Politik*, 19(2), pp. 73–92.
- Naila, T. et al. (2024) 'Mengoptimalkan Dampak Perbedaan Pendapat Masyarakat Akibat Kesalahpahaman Dari Bahasa Daerah', *KONSENSUS : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 1(4). Available at: <https://doi.org/https://journal.appisi.or.id/index.php/konsensus>.
- Najib, M., Maftuh, B. and Malihah, E. (2015) 'PERANAN PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL UNTUK MEMINIMALISASI KONFLIK ISU SARA DI INDONESIA', *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 5(2), pp. 127–136.
- Nasoha, A.M.M. et al. (2025) 'Digital Pancasila : Strategi Komunikasi dalam Mempromosikan Nilai-Nilai Kebangsaan di Era Media Sosial', *Jurnal Hukum, Administrasi Publik Dan Negara*, 2(3), pp. 137–152. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/hukum.v2i3.274>.
- Nurlaila, C. et al. (2024) 'Dinamika Perilaku Gen Z Sebagai Generasi Internet', *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 1(6), pp. 95–102. Available at: <https://doi.org/10.62383/konsensus.v1i6.433>.
- Purboyo, M.G. et al. (2025) 'Ambivalensi Politik Digital : Algoritma , Gamifikasi , dan Polarisasi Generasi Z di TikTok', *JSA (Jurnal Sosiologi Andalas)*, 11(2), pp. 172–190. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.25077/jsa.11.2.172-190.2025>.
- Ramadhani, S. (2025) 'PUBLISTIK : Riset Jurnalistik dan Komunikasi Media Analisis Penyebaran Informasi Palsu dan Ujaran Kebencian di Media Sosial Indonesia : Studi Kasus Berita Hoax Dan Hate Speech', *Publistik: Riset Jurnalistik dan Komunikasi Media*, 2(1), pp. 28–34.
- Rastati, R. (2022) 'INTERNALIZING PANCASILA THROUGH POP CULTURE AND YOUTH COMMUNITY', *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 24(2). Available at: <https://doi.org/10.55981/jmb.1601>.
- Ruslan, I. and Hakiki, K.M. (2022) 'ANTAR AGAMA DI INDONESIA', *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 17(2), pp. 201–222.
- Ruyadi, Y. et al. (2023) 'Challenges and strengthening the role of Pancasila ideology in the reform era through increasing literacy', *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 20(2), pp. 312–321. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.21831/jc.v20i2.63991>.
- Saidi, M.R., Supriyono and Atok, R. (2022) 'THE EFFECT OF DIGITAL LITERACY AND CIVIC LITERACY ON THE PERSONAL ', *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(1), pp. 119–128.



- Sajidin, M., Farhanuddin and Saputra, I. (2025) 'Revitalization of Pancasila Ideological Values to Strengthen the Role of Youth in National Resilience', *Integralistik*, 36(2), pp. 155–167. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/v7600e28> Submitted:
- Suhendra and Pratiwi, F.S. (2024) 'Peran Komunikasi Digital dalam Pembentukan Opini Publik : Studi Kasus Media Sosial', *IAPA | Universitas Sriwijaya Prosiding: Resiliensi Indonesia dalam Pusaran Disrupsi Global*, 2(6), pp. 293–315.
- Sukidin, Hudha, C. and Basrowi (2025) 'Shaping democracy in Indonesia : The influence of multicultural attitudes and social media activity on participation in public discourse and attitudes toward democracy', *Social Sciences & Humanities Open*, 11(March), p. 101440. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.101440>.
- The Global Statistics (2024) *Pengguna Media Sosial di Indonesia Sepanjang 2024*, Info Ketapang.
- Tjasmadi, M.P. and Christianto (2025) 'Jurnal shanan', *Jurnal Shanan: Kajian Pendidikan Agama Kristen*, 9(1), pp. 130–146. Available at: <https://doi.org/10.33541/shanan.v9i2.7302>.
- Vasist, P.N., Chatterjee, D. and Krishnan, S. (2024) 'The Polarizing Impact of Political Disinformation and Hate Speech: A Cross-country Configural Narrative', *Information Systems Frontiers*, 26(2), pp. 663–688. Available at: <https://doi.org/10.1007/s10796-023-10390-w>.
- Wardani, M. (2025) 'The Impact of Political Polarization on Social Cohesion in a Multicultural Society', *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(1), pp. 713–722.
- Wulan, N. et al. (2025) 'Konsep dan Praktik Metode Kualitatif untuk Penelitian Sosial', *RISOMA : Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 3(4). Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/risoma.v3i4.860>.
- Wulandari, V., Rullyana, G. and Ardiansah (2021) 'Pengaruh algoritma', *Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 17(1). Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/bip.v17i1.423>.
- Yashila, P. and Athifahputih, R. (2022) 'Penegakan hukum terhadap penyebaran berita hoax di lihat dari tinjauan hukum', *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 10(1), pp. 64–77.